

GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 903 - 120 - 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PEMBUKTIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk keberhasilan penyelenggaraan dan pencapaian program/ kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran Pemerintah Daerah, dilaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap program/kegiatan secara menyeluruh di Provinsi Sumatera Barat secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan data yang akurat dan tepat waktu melalui penerapan e-government dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasiskan Pembuktian (SIMBANGDA BASED EVIDENCE);
 - bahwa untuk pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 116 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-government;
 - 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - 3. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 2/INST-2014 tentang Mekanisme Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (Simbangda) Berbasis Pembuktian atau Simbangda Based Evidence sebagai salah satu alat pengendalian capaian kinerja fisik dan keuangan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEDŲA

: Membentuk Tim Pengelola Simbangda Based Evidence di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Ketua

Mengendalikan dan memastikan keberlangsungan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian (SIMBANGDA BASED EVIDENCE) dalam mendukung pengawasan dan pengendalian terhadap program/kegiatan secara menyeluruh di Provinsi Sumatera Barat secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan data yang akurat dan tepat waktu;

B. Sekretaris

Membantu Ketua dalam hal pemberian dukungan pengendalian serta mengarahkan tugas koordinator administrator, administrator dan operator SIMBANGDA BASED EVIDENCE dalam menghasilkan data yang dibutuhkan dalam pengendalian terhadap program/kegiatan;

C. Koordinator Administrator

Memastikan Administrator melaksanakan tugas sesuai dengan beban kerja yang telah ditetapkan dan memberikan arahan serta solusi apabila terjadi permasalahan dalam pemanfaatan SIMBANGDA BASED EVIDENCE;

D. Anggota Admin

- 1. mengelola jalannya Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian;
- 2. Melakukan pemantauan atas proses input data evidence dan proses capaian SKPD sesuai dengan SKPD yang dikoordinasikan;
- 3. melakukan pembimbingan kepada operator yang berada pada masingmasing SKPD/Unit; dan
- 4. melakukan pengawasan terhadap kinerja operator yang berada pada masing-masing SKPD/Unit Kerja setiap bulannya.

E. Help Desk

- 1. melakukan Validasi pada evidence yang telah diupload oleh SKPD;
- 2. mengingatkan SKPD yang terlambat dalam input/upload data realisasi fisik dan keuangan setiap bulannya;
- 3. melakukan pendampingan kepada operator yang berada pada masingmasing SKPD/Unit Kerja yang mengalami kendala dalam pemanfaatan SIMBANGDA BASED EVIDENCE; dan
- 4. melakukan koordinasi dengan operator/Kepala Sub Bagian Program/Tata Usaha yang berada pada masing-masing SKPD/Unit Kerja setiap bulannya.

F. Operator SKPD

Melakukan entry dan rekon data masing-masing SKPD sesuai dengan format yang terdapat pada Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian.

KEEMPAT

Kepada Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian (SIMBANGDA BASED EVIDENCE) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium per bulan sebagai berikut;

Ketua : Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Sekretaris : Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Koordinator Admin : Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Anggota Admin : Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Help Desk : Rp. 600.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

Operator SKPD : Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada masingmasing SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai tugas dan

tanggung jawabnya.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2019.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 31 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 3. Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan
- 4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 120 - 2019 TANGGAL : 31 JANUARI 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PEMBUKTIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PEMBUKTIAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Alwis	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Ir. H. Benni Warlis, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris
3.	Drs. Luhur Budianda SY, M.Si	Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat	Koordinator Admin
4.	Doni Rahmat Samulo, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Pembangunan pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau	Anggota Admin
5.	Rozaldi Rosman, S.STP	Kasubbag Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Pengendalian Data pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau	Anggota Admin
6.	Febi Fortuna, S.STP	Kasubbag Infrastruktur dan Kewilayahan pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau	Anggota Admin
7.	Ir. Benny Sakti, MM	Staf Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau	Help Desk
8.	Rizikan, SH	Staf Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau	Help Desk
9.	Rahmi Dewi, ST, MM	Staf Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau	Help Desk
10.	Rosi Meilef Deritra, ST	Staf Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau	Help Desk
11.	Delvi Sukri	Staf Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau	Help Desk
12.	Khairun Nisa Afdal, A.Md	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat	Operator SKPD
13.	Zelfi Mailinda, S.Kom	Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau	Operator SKPD
14.	Yefrianno	Biro Bina Mental dan Kesra	Operator SKPD
15.	Herwin	Biro Humas	Operator SKPD
16.	Deni Aldes, A.Md	Biro Organisasi	Operator SKPD
17.	Desi Anggraeni,A.Md	Biro Pemerintahan	Operator SKPD
18.	Elwis Sartika, A.Md	Biro Adm Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Operator SKPD
19.	Devi Anita, SE	Biro Perekonomian	Operator SKPD
20.	Fithria Sari, SE	Biro Hukum	Operator SKPD
21.	Joni Anwar, S.Sos	Biro Umum	Operator SKPD
22.	Hefrizal, A.Md	Biro Umum	Operator SKPD
23.	Ardiansyah Asril, SE	Inspektorat	Operator SKPD
24.	Erlina, SE	Inspektorat	Operator SKPD
25.	Rahman Hakim Agpar,S.STP	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator SKPD
26.	Shintia Joenevfta, A.Md	Dinas Pariwisata	Operator SKPD
27.	Sinta Fatmawati, A.Md	Dinas Pariwisata	Operator SKPD
28.	Widian Ningrum, S.Pt	Dinas Lingkungan Hidup	Operator SKPD
29.	Ir. Yestit Rina	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	Operator SKPD
30.	Novista Kartika Sari, A.Md	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	Operator SKPD

31.	Yuliasti, A.Md	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Operator SKPD
32.	Syafrizal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Operator SKPD
22	Hard Company CT	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan	Operator SKPD
33.	Hari Suseno,ST	Pertanahan	
34.	Herman, Amd	Dinas Kesehatan	Operator SKPD
35.	Risa Marfiyenti, A.Md RM	Dinas Kesehatan	Operator SKPD
	Lindrawati, SE	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Operator SKPD
36.		Satu Pintu	•
37.	Dedi Saputra,ST	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Operator SKPD
38.	Elfino Roza,ST	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Operator SKPD
39.	Arnes Basri, S.Kom	Dinas Sosial	Operator SKPD
40.	Ade Efdira, SS	Dinas Sosiał	Operator SKPD
41.	Nova Susanti, SE, MM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Operator SKPD
42.	Hayunanda Mutiara, ST	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Operator SKPD
43.	Retma Nency, S.STP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Operator SKPD
44.	Pratama Winia Nazwir, S.STP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Operator SKPD
45.	Syafruddin	Dinas Pangan	Operator SKPD
46.	Rudy Ananta, S.ST	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Operator SKPD
47.	Saidil Anam, ST	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Operator SKPD
48.	Hafizh Ahmad, ST	Dinas Koperasi, UKM	Operator SKPD
49.	Dian Pertiwi, A. Md	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	Operator SKPD
50.	Mardiah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	Operator SKPD
51.	Efrita Aswani, S.Pi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Operator SKPD
52.	Yuni Novriani, ST	Dinas Kelautan dan Perikanan	Operator SKPD
53.	Nike Angelia, ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operator SKPD
54.	Effi Warni, ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operator SKPD
55.	Harnesia Wirda, ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operator SKPD
56.	Nandi,A.Md	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operator SKPD
57.	Abu Bakar Sidik, S.Pt	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Operator SKPD
58.	Aulia Gunaldi, S.Pt	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Operator SKPD
59.	Wirda Arora,SE	Dinas Kebudayaan	Operator SKPD
60.	Putri Jaya Hakim, SE	Dinas Kebudayaan	Operator SKPD
61.	Eli Suryani, S.Kom	Dinas Kebudayaan	Operator SKPD
62.	Zulfahmi	Dinas Kebudayaan	Operator SKPD
63.	Liza Marhaini, SH, MM	Dinas Pendidikan	Operator SKPD
64.	Hermondoni Putra, S. Pd. I	Dinas Pendidikan	Operator SKPD
65.	Muhammad Zen	Dinas Pendidikan	Operator SKPD
66.	Irsad Sadri, S.I.Kom	Dinas Pendidikan	Operator SKPD
67.	Muhammad Zulkifli	Dinas Pendidikan	Operator SKPD
68.	Haniati Zahra, S.Si	Dinas Pendidikan	Operator SKPD
69.	Waluyo S.Sos	Dinas Kehutanan	Operator SKPD
70.	Ninin Asriani	Dinas Kehutanan	Operator SKPD
71.	Yazdi, ST	Dinas Pemuda dan Olahraga	Operator SKPD
72.	Resti Yavarezi. R, A.Md	Dinas Komunikasi dan Informatika	Operator SKPD
73.	Zulvia Novita, SE	Dinas Komunikasi dan Informatika	Operator SKPD
74.	Agung Ferdana, S.ST (TD)	Dinas Perhubungan	Operator SKPD
75.	Devi Wahyuni, SH	BadanKepegawaian Daerah	Operator SKPD
76.	Novrio Vernando, SE	BadanKepegawaian Daerah	Operator SKPD

•

77.	Rika Amir,SE,MM	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Operator SKPD
78.	Sasli Adis,SE	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Operator SKPD
79.	Nizhamul Bastian,SH	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Operator SKPD
80.	Hendra Zaimar	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Operator SKPD
81.	Harry Febri,SE	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Operator SKPD
82.	Intanoza Ruska, SE	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Operator SKPD
83.	Tita Shania	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Operator SKPD
84.	Yudi Prasetia,SE	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Operator SKPD
85.	Hida Perwina Ridia, SE	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Operator SKPD
86.	Hera Arman , ST	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Operator SKPD
87.	Harry Achta Putra,SE	Badan Keuangan Daerah	Operator SKPD
88.	Saftriyeni,A.Md	Badan Keuangan Daerah	Operator SKPD
89.	Febrina Marlisa, SS	Badan Penghubung	Operator SKPD
90.	Liza Novelia, SE	Badan Penelitian dan Pengembangan	Operator SKPD
91.	Mulya Uthami, A.Md	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator SKPD
92.	Lena Wahyuni, S.Sos	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator SKPD
93.	Basrefnaldi,M.Si	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Operator SKPD
94.	Maizet Fitra, S.Kom	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Operator SKPD
95.	Yosi Febrina, SE, Ak, MM	RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	Operator SKPD
96.	Imran, SKM	RSUDPariaman	Operator SKPD
97.	Ns.Rahmat, S.Kep	RSUD Muhammad Natsir Solok	Operator SKPD
98.	Khairul Fadhli, SE	RSJ HB. SAANIN	Operator SKPD
	I		



	Caden Person — sun nob Peniùangonan Desert	11 Pea Aurol (SE, 443)	\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.
	Particular of orest and the major grown foreign	Smith Adia, SF	6.4
		Reflected Co. Ban S. 4	
Commence	n stock exergredom bach aseochambé neitriú	भावतीती होत्राप्ति	30.
	al er et nomug ue degot oude based, au lei s mejeur d	12 1 ml - 3 1 ml - 3 1 ml	.tg
idaž is laiko i	and the second appears to the first of the second second	Be asked are seed.	3.8
i g est (j. 2005)	Bucton Kesmbada Shaptu dha Halama	અલ્ફા ે અં વી	.50
as view of	विवर्णका में एक्टब्स्टा प्रकार किरान् यात्र da a प्रारम्भित	Han been beat	i-c
	t Dadan Foreign is gwelliadae Baccaea Damin	hide Postan Hilla, 55	ila i
CEXA POLICIONO	ส์คาคาม คระจากเล่า วันสุดเลองไ ล กลอด กับเป็นปี ,	To opiate and	
The residence	core of hyprayof raud\$	52,m2.55 c 1 o 2, ye. 50	37.
าง เดิดเห ลาดด ูจิ	deservices agreement restricts	tiva korpatik.	35.9
សមិទាំ ខេត្តស្ ម ក្នុង	gersche 28 auf 48	iej ir iš	
Cook wastegs	Bertan Perekabananan Panyembangan	Elza Mrvulia, SE	.W.
Cand terrenses	- 5อสวด Peng er อลอฐบล (มิสาทัยว Dave กละแช่ว	Molys Utamati, 4. Vid	
CDD Wennyo	Sadac Tongso Pangson amber boy. was usia	Lens Wahyuni, Clacs	.80
ସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ପ୍ରତି	nargendok national in nachfilogi. Z	Beareinald Madi	93.
G932 5 35 5 90 1	असंकृति मेरे दे लक स्टब्ल्या सम्बद्धाः सम्बद्धाः	hodze मिल्ड इतरका	;, o
GEN NORTH	ispendible endeste manifra of outer i	(You'deatha, SE, Alc MM	28
Deck whereast	PSE Penchera	10 40,500	30
i dedžienet gū	South and branched the 1978	ু প্রান্ত করে বেশিক	
Tages de l'eseption	8460040.64 123	Marrol Fachli, St.	.£e

1,5

